

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG

| Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka pemerataan hasil pembangunan | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Sasaran : Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan | | | | |
| KINERJA UTAMA 1 | INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 | FORMULA/PENJELASAN 3 | SUMBER DATA 4 | PENANGGUNG JAWAB 5 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak | Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak | $\frac{\text{Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum} + \text{Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah}}{2} + \frac{\text{Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha}}{1}$ <p style="text-align: center;">2</p> <p>- Penjelasan : Masyarakat yang mendapatkan akses air minum adalah jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan perpipaan (PDAM dan HIPPAM serta bangunan bukan jaringan perpipaan terlindungi yaitu sumur gali dan sumur pompa tangan). Persentase penduduk yang mendapatkan air minum merupakan persentase hasil pembagian jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum dengan jumlah penduduk di Kabupaten Malang - Masyarakat terlayani air limbah adalah jumlah penduduk yang terlayani dengan septiktank/MCK komunal/sistem pengelolaan air limbah-SPAL terpusat. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah merupakan persentase hasil pembagian jumlah penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah dengan jumlah penduduk di Kabupaten Malang - Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan bagi penghuninya serta kecukupan luas ruang. Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha merupakan persentase hasil pembagian jumlah rumah tidak layak huni terbangun dengan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Malang</p> | RISPAM, DPKPCK, BPS, SSK, MPSS, RAD AMPL, PDAM, Dinkes | DPKPCK (Bidang Permukiman dan Bidang Perumahan) |
| Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi Standar Teknis | Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi Standar Teknis | $\frac{\text{Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya} + \text{Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)}}{2}$ <p style="text-align: center;">2</p> <p>- Penjelasan : Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya merupakan persentase hasil pembagian luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan luas rencana kawasan budidaya berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Malang - Bangunan gedung pemerintah dengan kondisi baik adalah kondisi bangunan aset Pemkab Malang yang masih layak dipergunakan. Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif merupakan persentase hasil pembagian jumlah bangunan berkondisi baik dan representatif dengan jumlah bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Malang.</p> | DPKPCK | DPKPCK (Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan) |

Kepanjen, 01 September 2021

Plt. Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Malang


KHAIRUL ISMAIDI KUSUMA, S.T., MT
Pembina
NIP. 19750908 200501 1 005